

jasmani (materiil), tetapi bekerja juga sebagai sarana untuk beribadah (spirituil), karena ibadah termasuk perintah Allah. Dengan kata lain bekerja adalah bagian dari amal shaleh dan harus diniatkan untuk agama. Orang yang tidak bekerja akan rugi, karena selain tidak akan mendapatkan hasil, juga tidak mendapat pahala. Orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan hasil ganda, yaitu materi dan pahala. Bekerja, selain berusaha dengan penuh kesungguhan juga harus berdoa agar mendapat pekerjaan yang halal. Bekerja harus didasari dengan sifat jujur, amanah dan hemat terhadap hasil kerja. Itu artinya, bekerja tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus didasari dengan kejujuran dan amanah serta harus bertujuan untuk mendapatkan hasil yang besar dan halal, tidak asal mendapatkan hasil walaupun tidak halal. Selain itu mereka juga menyadari akan tanggung jawab sosialnya. Ideologi LDII yang bersifat politis, yaitu LDII dalam melihat politik, kekuasaan, dan negara adalah sebagai produk dari dinamika sosial kemasyarakatan dan kebudayaan, yang kemudian dikenal sebagai gerakan dakwah. Bagi LDII, partai politik ataupun negara adalah sub-sistem dari gerakan dakwah. Dari sinilah terlihat bahwa hubungan antara LDII dengan partai politik tidak konsisten, selalu berubah dan tidak pernah bersifat struktural. Dengan kata lain LDII ditempatkan di atas basis yang lebih besar dan kultural dibandingkan dinamika politik kenegaraan. Dalam hal ini LDII cenderung bersikap pragmatis atau akomodatif dalam politik. Hal ini terlihat dalam hasil Rakernas pada Tahun 2007 di Jakarta, yang memutuskan LDII kembali menetapkan Islam

sebagai asas tunggal, padahal dalam keputusan MUNAS tahun 2005 bahwa LDII berazaskan Pancasila. Meskipun demikian, persoalan ini masih bisa ditoleransi karena Islam dan Pancasila bukanlah dua hal yang kontradiktif secara substansial. Masing-masing memiliki wilayah aplikatif tersendiri. Rakernas ini juga memutuskan bahwa LDII sebagai organisasi sosial-keagamaan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Sebuah sikap “budi luhur” atau “luhuring budi” yang selalu didengungkan kepada setiap Jama’ah agar mereka bisa aman dimanapun mereka berada.

3. Respon tokoh masyarakat muslim kota Kediri yang terdiri dari tokoh MUI, Wahidiyyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap ideologi Gerakan keagamaan LDII, terdapat dua tipologi, yaitu respon akomodatif dan respon resistensif. Respon akomodatif masyarakat Kediri meliputi, LDII yang digolongkan sebagai aliran sesat kini mulai memudar, atau tidak tampak demikiran. Interaksi sosial LDII yang kini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda inklusif atau lebih terbuka. Dari respon akomodatif ini tokoh Wahidiyyah, NU dan Muhammadiyah cenderung berpandangan sama, tetapi berkenaan dengan respon resistensif tokoh masyarakat terhadap ideologi LDII, baik tokoh MUI, Wahidiyyah, NU dan Muhammadiyah berbeda. Menurut tokoh MUI, LDII masih menutup rapat-rapat akses terhadap ideologi mereka. Menurut tokoh Wahidiyyah dan NU bahwa LDII diyakini sebagai perpanjangan ajaran Islam Jamaah atau Darul Hadits dilihat dari sisi historisnya. Aqidah LDII yang dianggap menyimpang dari Islam *maenstream* yang ada dan sikap keagamaan dan

pengajaran LDII dianggap masih terlalu eksklusif bagi masyarakat di luar golongan mereka, dan mereka tetap mengajarkan materi hadits yang sama seperti dulu. Tokoh NU dan Muhammadiyah memiliki kesamaan yaitu tentang Islam dan Negara dalam mengkritisi ideologi politik LDII, yang mengarahkan Islam menjadi sebuah ideologi negara. Sedangkan ideologi ekonomi Muhammadiyah menafikan konsep halal LDII yang dianggap terlalu sempit dan konsep barakah LDII. Hal ini disebabkan bagi LDII harta yang halal adalah harta yang sudah diinfaqkan tanpa memedulikan cara mendapatkannya, sedangkan bagi Muhammadiyah harta yang halal adalah harta yang diperoleh dengan cara yang benar.

B. Implikasi Teoritik

Berangkat dari data yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki implikasi, yaitu: Merupakan antithesis dari teori-teori yang digunakan peneliti terdahulu seperti Hartono Ahmad Jaiz, Mundzir Thohir, dan Hilmi Muhammadiyah yang cenderung memandang LDII sebagai respon terhadap organisasi keagamaan yang selalu bersifat resistensif dan eksklusif, baik secara ideologis maupun doktrin keagamaannya. Padahal dalam penelitian ini membuktikan bahwa respon terhadap LDII selain bersifat resistensif, terdapat juga respon masyarakat di luar keanggotaan LDII yang bersifat akomodatif. Hal ini dibuktikan dengan tidak semua ideologi LDII ditolak oleh masyarakat di luar LDII baik itu ideologi keagamaan, politik dan

